

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil implementasi program *capacity building* sektor industri elektronik Indonesia adalah bawah program *capacity building* sektor industri elektronik Indonesia belum dapat di implementasikan secara optimal. Hal itu terjadi karena pada masa implementasinya terdapat beberapa permasalahan yang krusial. Berangkat dari penjelasan yang sudah dijelaskan dan dianalisis pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan secara garis besar mengapa program *capacity building* sektor elektronik Indonesia tidak dapat di implementasikan secara optimal. Berikut point permasalahannya:

1. Pengusulan kegiatan yang lama, permasalahan ini terjadi pada program pelatihan yang tidak memiliki kejelasan terkait kegiatan yang disetujui, karena pada faktanya pada tahun 2008 program pelatihan belum menyelesaikan kesepakatan antar kedua negara untuk implementasi program.
2. Ketidak sesuaian implementasi kegiatan dengan *Term Of Reference* yang telah dibuat, permasalahan ini terjadi pada program *dispatch expert* dan *training*.
3. Periode kegiatan yang terlalu pendek, hal ini terjadi pada program bantuan teknik dan tenaga ahli yang hanya di implementasikan hanya dua tahun saja, yakni periode 2010-2012.
4. Tidak maksimalnya transfer ilmu yang dilakukan oleh pihak Jepang, dapat difaktakan dengan pengiriman jumlah tenaga ahli yang terlalu minim yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
5. Kurangnya pihak yang memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek
6. Inisiatif proyek peningkatan kapasitas pada sektor elektronik belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan peningkatan daya saing produk industri untuk ekspor.

Point permasalahan diatas kemudian di perkuat lagi dengan data yang sebelumnya sudah dianalisis, yakni mencakup pergerakan aktivitas ekspor-impor sektor elektronik yang mengalami defisit perdagangan pada periode 2008-2013 serta perbandingan hasil implementasi dari sektor otomotif dan elektronik yang menghasilkan nilai 3:1. Fakta selanjutnya adalah jika dianalisis, proyek MIDEK-IJEPA ini hasilnya bertolak belakang dengan prinsip EPA itu sendiri. Prinsip EPA menjelaskan bahwa kerangka kerjasama tersebut dalam implementasinya akan mneghasilkan output berupa surplus ekonomi dan dapat membuka akses pasar secara meluas. Pada faktanya proyek kerjasama ini mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami defisit dan tidak adanya akses pasar yang luas karena Indonesia belum mendapatkan secara paten atas sertifikasi uji laboratorium berskema IECCE/CB.

6.2 Saran

Dalam hasil evaluasi MIDEK-IJEPA bahwasanya output yang dirasakan oleh pihak Indonesia secara garis besar tidak dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kapasitas industri maupun bagi perekonomian Indonesia. Saran yang dapat diberikan untuk fenomena tersebut ialah jika memang MIDEK akan berlanjut dengan regulasi dan skema yang baru, pihak Indonesia harus lebih tegas kepada Jepang dalam pengimplementasian bantuan yang telah disepakati dalam perundingan kerjasama IJEPA. Lanjutannya, program tersebut juga harus memberikan output yang optimal untuk kapasitas industri manufaktur Indonesia serta perekonomian Indonesia.

Adapun saran serta rekomendasi yang dapat penulis berikan terkait program capacity building pada skema MIDEK-IJEPA. Dalam kerjasama proyek MIDEK hanya ada empat program disetujui untuk diberikan kepada pihak Indonesia dalam peningkatan kapasitas sektor industri. Berangkat dari empat sektor tersebut, Indonesia perlu menginisiasikan program tambahan untuk melengkapi empat program yang sudah disetujui. Program tambahan yang mungkin bisa jadi rekomendasi adalah terkait program dalam penyediaan peralatan dan program peningkatan industri manufaktur. Hal tersebut dapat dijadikan rekomendasi oleh penulis, karena melihat tantangan Indonesia dalam pembiayaan untuk membeli fasilitas dalam pengujian laboratorium, disebutkan bahwa untuk membeli fasilitas barang tersebut Indonesia harus mengocek kantong hingga satu milyar per peralatan.

Kemudian rekomendasi terakhir yang dapat penulis berikan adalah terkait stake holder dalam proyek MIDEK-IJEPA. Indonesia perlu membentuk suatu kesekretariatan untuk program MIDEK secara khusus untuk menangani pengelolaan administrasi dalam pelaksanaan untuk masing-masing proyek. Rekomendasi ini sejalan dengan tidak adanya pihak yang menangani secara khusus pengelolaan proyek MIDEK, sehingga dampaknya adalah menyulitkan proses monitoring dan evaluasi proyek.